

OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Ikbārul Mufid
NPP. 29.0034

*Asdaf Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
Program Studi Keuangan Publik*

Email: fikruljihad07@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study discusses the optimization of fixed asset administration during the Covid-19 pandemic at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of South Aceh Regency. This study was carried out to determine whether or not the implementation of fixed asset administration at the Financial Management Agency South Aceh Regency. **Purpose:** The purpose of this research is to measure the level of optimization of fixed asset administration at the Regional Financial Management Agency of South Aceh Regency, to see obstacles in the implementation of fixed asset administration at the Regional Financial Management Agency and to assist the government in determining efforts to overcome obstacles to the administration of fixed assets in the Management Agency. Regional Finance of South Aceh Regency. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and data collection techniques in the form of observation, documentation, and interviews. **Result:** The results of the study indicate that the Implementation of Fixed Assets Administration at the Financial Management Agency of South Aceh Regency has been optimal, this is based on the fact that every indicator that is used as a reference for research has been running well and in an orderly manner. However, in its implementation there are still some obstacles such as the low competence of employees and the existence of WFH, regulations that still need to be perfected, there is still no reward and punishment system from the leadership, the SIMDA BMD application still often experiences errors, and facilities and infrastructure that are still not supportive. From some of these problems, the government has made efforts in the form of improving the quality of employees through training, discussing the latest BMD Management Qanun, directives and leadership guidance for employees to work optimally, updating the SIMDA BMD application system, as well as updating and fulfilling the needs of facilities and infrastructure. supporters. **Conclusion:** Based on the analysis carried out, it was concluded that the administration of fixed assets during the covid-19 pandemic at the Regional Financial Management Agency of South Aceh Regency can be said to be optimal although there are still some notes that still need to be improved.

Keywords: *Administration, Covid-19 Pandemic, Fixed Assets, and Optimization*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini membahas tentang optimalisasi penatausahaan aset tetap pada masa pandemi Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan, Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui optimal atau tidaknya pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan. **Tujuan:** Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat optimalisasi penatausahaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, melihat hambatan dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan membantu pemerintah guna menentukan upaya dalam mengatasi hambatan penatausahaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan sudah optimal, hal ini didasari karena setiap indikator yang menjadi acuan penelitian sudah berjalan dengan baik dan tertib. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti rendahnya kompetensi pegawai dan adanya WFH, peraturan yang masih harus disempurnakan, masih tidak adanya sistem reward dan punishment dari pimpinan, aplikasi SIMDA BMD masih sering mengalami kesalahan, serta sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung. Dari beberapa masalah tersebut, pemerintah sudah melakukan upaya berupa peningkatan kualitas pegawai melalui pelatihan, pembahasan Qanun Pengelolaan BMD terbaru, arahan dan bimbingan pimpinan terhadap para pegawai untuk bekerja dengan maksimal, pembaruan terhadap sistem aplikasi SIMDA BMD, serta pembaruan dan pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pendukung. **Kesimpulan:** Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penatausahaan aset tetap pada masa pandemi covid-19 di Badan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kabupaten Aceh Selatan dapat dikatakan optimal meskipun masih terdapat beberapa catatan yang harus masih diperbaiki.

Kata kunci : Aset Tetap, Barang Milik Daerah, Covid-19, Optimalisasi, dan Penatausahaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa setiap pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah pada dasarnya dimulai dari pengelolaan keuangan sampai dengan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan tersebut. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media yang menunjukkan tingkat akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan terhadap potensi dan sumber-sumber keuangan serta

pelaksanaan penyelenggaraan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam pelaporannya LKPD harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disusun mengacu pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang dijadikan pedoman penyusunan LKPD. Laporan Keuangan Daerah yang telah disusun kemudian akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan secara rinci dan mendalam.

Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas dan peran dalam memberikan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah dilaporkan pada akhir tahun anggaran, penilaian tersebut berupa pemberian Opini terhadap kualitas laporan keuangan yang telah diserahkan kepada BPK. Opini tersebut terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pengelolaan aset tetap ataupun manjaemen barang milik daerah merupakan hal yang sering kali menjadi penghambat diperolehnya opini WTP dari BPK. Diantara berbagai tahapan dalam penatausahaan aset, salah satu tahap yang menjadi unsur penting yaitu tahapan inventarisasi. Inventarisasi adalah suatu tindakan untuk menghitung, menyelenggarakan, mengelola, mencatat, mengatur dan melaporkan setiap Barang Milik Daerah dalam unit pemakaian. Selain dari masalah yang disebutkan BPK terkait proses inventarisasi terhadap aset daerah yang dimanfaatkan pihak lain agar dapat ditarik dan digunakan untuk operasional pemerintahan kabupaten aceh selatan juga terdapat masalah Dalam kegiatan perhitungan dan pencatatan. Dalam proses tersebut diperlukan koordinasi dan survei lapangan untuk meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya. Selain itu koordinasi dan survei lapangan juga dilakukan untuk memahami kondisi terkini barang dan mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah dan kepemilikan yang tidak jelas. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan survei lapangan dan koordinasi harus berhubungan secara langsung dengan kegiatan luar lapangan dan harus berinteraksi dengan pemilik BMD maupun masyarakat umum.

Proses Penatausahaan aset dapat menjadi terhambat mengingat pandemi yang berkepanjangan terus melanda negeri ini. Pandemi yang disebabkan oleh Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang dimulai dari pengumuman kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Republik Indonesia. Adanya kasus ini membuat pergerakan kegiatan di luar ruangan menjadi dibatasi, dengan tujuan memutus penyebaran virus tersebut dikarenakan cara penyebaran penyakit COVID-19 terjadi melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk.

Pembatasan ini pun didukung oleh penetapan status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada bulan Maret 2020. karena status tersebut, kegiatan pelayanan penatausahaan BMD juga harus menyesuaikan keadaan atau kondisi yang memungkinkan untuk dilaksanakan perhitungan dan pencatatan, terutama kegiatan yang mengharuskan koordinasi dan survei lapangan. Untuk mengatasi penularan virus tersebut para pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan work from home (WFH) secara

bergantian. Hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan hasil kerja. Secara khususnya untuk proses penatausahaan aset tetap salah satu tahapan yang paling terdampak pandemi Covid-19 adalah proses Pengidentifikasian data terhadap aset tetap (sensus aset) untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 masih tidak dapat dilaksanakan karena adanya Refocusing anggaran yang menyebabkan Pemotongan anggaran terhadap Kegiatan Sensus Aset Tersebut, Hal itu menjadi suatu masalah karena data sensus aset tetap tersedia secara lengkap dan menyeluruh terakhir di sensus pada tahun 2015, permasalahan tersebut mengakibatkan data yang tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Kondisi Aset Tetap masih belum diperbarui sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang terjadi, yang menjadi poinnya adalah Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telat memberikan dampak negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah termasuk di Kabupaten Aceh Selatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah salah satu hal yang terdampak adalah kegiatan penatausahaan aset tetap yang dilakukan Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Penatausahaan aset tetap merupakan salah satu kegiatan yang masih terdapat catatan terutama terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya. Berdasarkan dengan hasil audit laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK, proses inventarisasi aset tetap menjadi salah satu kegiatan yang masih tergolong kurang tertib karena masih terdapat berbagai macam kesalahan dalam pencatatan data terkait hasil inventarisasi aset mulai dari kesalahan terkait jumlah, kondisi, lokasi serta bukti kepemilikan. Semua permasalahan tersebut seakan menjadi lebih kompleks sejak mewabah mulai dari penerapan pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan para pegawai harus bekerja dari rumah, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas kinerja seorang pegawai. Selain itu penanggulangan pandemi covid-19 yang membutuhkan dana yang sangat besar mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan Refocusing dan Realokasi anggaran.. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas perlu adanya pemecahan masalah agar kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah secara umumnya dan secara khusus terkait penatausahaan aset tetap pada masa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan secara optimal sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti tentang Pengelolaan keuangan daerah dengan judul **“OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN”**.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang pengelolaan dan penatausahaan aset tetap. Penelitian Ikbar Andrian Sumardi berjudul Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (2017) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan variabel aset tetap Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa

pengelolaan Aset Tetap di BPKD Kota Palembang. Penelitian Wini Widiaty yang berjudul Pengaruh Penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bandung (2021) yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan variabel penatausahaan aset daerah dan kualitas laporan keuangan menemukan bahwa Penerapan penatausahaan aset tetap pada SKPD di Kabupaten Bandung sudah dilakukan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian Sierfi Rahayu yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak (2021) yang menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan variabel Pengelolaan Aset Daerah penelitian ini menunjukkan hasil bahwa belum optimalnya pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Lebak.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Optimalisasi Penatausahaan aset tetap pada masa pandemi covid-19 di BPKD Kabupaten Aceh Selatan dimana dalam konteks ini penulis ingin meneliti apakah Penatausahaan Aset Tetap pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan Optimal atau tidak dimana tidak hanya melihat satu aspek saja, melainkan menilai setiap kegiatan dalam penatausahaan mulai dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan. Pembahasan tersebut menjadi salah satu kebaruan yang tidak dijelaskan pada penelitian sebelumnya serta kondisi pandemi covid-19 juga menjadi kebaruan karena pada penelitian sebelumnya masih belum memasuki masa pandemi covid-19.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penatausahaan aset tetap pada masa pandemi covid-19 apakah optimal atau tidak.

II. METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara induktif. Menurut penulis, apabila dihadapkan pada kenyataan sosial yang tidak sesuai perkiraan (ekspektasi), maka metode kualitatif dianggap tepat untuk digunakan karena lebih mudah untuk disesuaikan dengan kondisi/situasi sebagaimana terjadi saat itu. Penelitian deskriptif yang dilakukan penulis bermaksud untuk mengamati dan menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan kemudian dicocokkan dengan teori-teori yang ada sehingga diperoleh pandangan sistematis yang tepat dan berdasar pada fakta di lapangan. Pendekatan induktif ialah pendekatan untuk membangun suatu teori yang bersifat universal bersumber pada hasil dari pengamatan di lapangan. Penarikan kesimpulan secara induktif diawali dengan lingkup yang khas serta terbatas dalam disusunnya sebuah argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan-pernyataan yang universal (Arikunto, 2010). Penulis mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6

orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Kepala Bidang Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Kepala Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Selatan, Kepala Subbidang Pemeliharaan dan Pelaporan BPKD Kabupaten Aceh Selatan, Staf Bidang Kekayaan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Selatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian telah dilakukan pada tanggal 3 Januari 2022 hingga 14 Januari 2022 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, maka penulis akan memaparkan data dan informasi, serta permasalahan yang didapatkan selama melaksanakan penelitian lapangan. Data dan informasi yang didapatkan oleh penulis didapatkan melalui melalui beberapa instrumen penelitian yaitu, observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi selama melaksanakan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 aset daerah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan aset tetap ini didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi. Penatausahaan aset tetap ini didalamnya menyusun Laporan Barang Milik Daerah yang akan digunakan sebagai penyusunan neraca. Penatausahaan barang milik daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan barang milik daerah adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Secara umum penatausahaan aset tetap daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 16 Tahun 2019 yang terdiri dari :

- Pembukuan yaitu proses pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventarisasi barang serta dalam daftar barang milik daerah.
- Inventarisasi yaitu kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.
- Pelaporan yaitu proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

3.1 Pembukuan Aset Tetap

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan

barang selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya. Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya. Pada masa pandemi covid-19 proses pembukuan aset tidak terdampak secara langsung, misalnya seperti adanya perubahan prosedur dalam pembukuannya. Akan-tetapi pandemi covid-19 berdampak pada kurang efektifnya kinerja pegawai serta adanya pemotongan terhadap anggaran dalam kegiatan pembukuan aset milik daerah.

Adapun praktiknya dalam hal pembukuan aset tetap BPKD Kabupaten Aceh Selatan sudah melaksanakan pembukuan yang merupakan proses pencatatan aset ke dalam daftar barang pengguna dan ke dalam kartu inventarisasi barang. Sebelum Melakukan Pencatatan, terlebih dahulu dilakukan penggolongan dan kodefikasi barang/aset tetap daerah. Pencatatan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan setiap ada barang masuk atau keluar (transaksi) harus melakukan entri data. Berikut ini merupakan contoh Kartu Inventarisasi Barang.

Gambar 4. 1

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah

No.	Arah Mutasi / Nomor Konting	Masa Berlaku I.S.		Luas (M2)	Tahun Pengalihan	Jenis Aset	Kategori Aset	Merk	Diperoleh			Penggunaan	Aksi	Risiko (Risiko Rp)	Keterangan	
		1	2						3	4	5					6
1	Tanah Milik Daerah (Tanah Milik Desa)	01/01/2013	01/01/2013	0000	01/01/2013	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
2	Tanah Milik Daerah (Tanah Milik Desa)	01/01/2013	01/01/2013	0000	01/01/2013	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
3	Tanah Milik Daerah (Tanah Milik Desa)	01/01/2013	01/01/2013	0000	01/01/2013	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
4	Tanah Milik Daerah (Tanah Milik Desa)	01/01/2013	01/01/2013	0000	01/01/2013	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
5	Tanah Milik Daerah (Tanah Milik Desa)	01/01/2013	01/01/2013	0000	01/01/2013	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
6	Tanah Milik Daerah (Tanah Milik Desa)	01/01/2013	01/01/2013	0000	01/01/2013	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
7	Tanah Milik Daerah (Tanah Milik Desa)	01/01/2013	01/01/2013	0000	01/01/2013	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
8	Tanah Milik Daerah (Tanah Milik Desa)	01/01/2013	01/01/2013	0000	01/01/2013	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
9	Tanah Milik Daerah (Tanah Milik Desa)	01/01/2013	01/01/2013	0000	01/01/2013	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
10	Tanah Milik Daerah (Tanah Milik Desa)	01/01/2013	01/01/2013	0000	01/01/2013	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

Sumber : BPKD Kabupaten Aceh Selatan

Dalam pelaksanaannya proses pengisian informasi pada Kartu Inventaris Barang masih ada beberapa yang belum lengkap. Hal tersebut merupakan permasalahan berulang dari tahun-tahun sebelumnya yaitu :

Tabel 4. 1

Data/Informasi Aset Tetap yang belum dicatat secara lengkap

No	Uraian	Informasi yang tidak lengkap
1.	KIB A – Tanah	Luas, Penggunaan, dan Nomor Sertifikat
2.	KIB B – Peralatan dan Mesin	Merk, Tipe, Lokasi, dan Nomor BPKB
3.	KIB C – Gedung dan Bangunan	Lokasi, Luas Bangunan, Dokumen Gedung/Tahun Perolehan, dan Status Tanah
4.	KIB D – Jalan, Irigasi dan Jaringan	Luas (Panjang dan Lebar Jalan), Lokasi, Dokumen Jalan/Tahun Perolehan
5.	KIB E – Aset Tetap Lainnya	Buku (Judul dan Spesifikasi), Barang Kesenian (Asal, Pencipta dan Bahan), serta Hewan Ternak (Jenis dan Ukuran)
6.	KIB F – Konstruksi Dalam Pengerjaan	Lokasi, Dokumen Pengadaan/Tahun Perolehan dan Tahun Mulai Pembangunan

Sumber : BPKD Kabupaten Aceh Selatan

Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam hal pembukuan aset tetap daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan masih Belum Optimal dikarenakan masih banyak temuan dan catatan dari BPK terhadap proses pembukuan aset tetap terutama terkait Kartu Inventarisasi Barang.

3.2 Inventarisasi Aset Tetap

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset daerah. Maksudnya adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan pengguna barang maupun yang berada dalam pengelolaan pengelola barang. Tujuan dari inventarisasi adalah agar semua aset daerah terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan aset tetap daerah. Inventarisasi dilakukan terhadap semua set yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau dari perolehan lainnya yang sah.

Pada masa pandemi covid-19 proses inventarisasi juga terkena dampaknya. Hal tersebut dikarenakan proses sensus aset yang seharusnya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 kemaren tidak dapat terselenggara karena adanya pandemi covid-19 yang berkepanjangan mengakibatkan Pemerintah mengeluarkan kebijakan refocusing dan realokasi

anggaran guna percepatan covid-19 dan anggaran untuk pengidentifikasian aset juga harus mengalami pemangkasan anggaran. Akan tetapi, proses inventarisasi tetap terlaksana dengan menggunakan hasil sensus aset tahun 2015 yang juga sudah mengalami pembaruan sesuai beberapa laporan SKPD pemilik aset yang sudah melaksanakan pembaruan data pertahun .

3.3 Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit penatausahaan aset pada pengguna Barang dan Pengelola Barang (Sinurat, 2015). Maksudnya adalah agar semua data dan informasi mengenai aset tetap yang dimiliki dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan aset tetap daerah dan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintahan. Tujuan dari pelaporan adalah untuk menyampaikan/mendapatkan data dan informasi aset tetap daerah dari hasil pembukuan dan inventarisasi yang dilakukan oleh pelaksana penatausahaan pada pengguna barang dan pengelola barang yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan aset tetap daerah. Meskipun dalam masa pandemi covid-19 setiap pemerintah daerah tetap dituntut untuk menyusun laporan keuangannya tidak terkecuali pelaporan aset baik per triwulan, semester serta tahunan sesuai dengan Undang-Undang 15 Tahun 2004.

3.4 Diskusi Temuan Utama

Penelitian ini membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada masa pandemi covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang mana membahas setiap kegiatan dalam proses Penatausahaan mulai dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dari penjelasan indikator-indikator tersebut maka bisa dipahami bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada masa pandemi covid-19 telah dilaksanakan secara optimal karena dari tiga indikator tersebut 2 indikator sudah memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku yaitu terkait pembukuan aset tetap dan pelaporan aset tetap, sedangkan proses inventarisasi masih ada catatan dari BPK terkait Pelaksanaannya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kesimpulan penelitian adalah pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada masa pandemi covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan masih belum optimal. Hal ini disebabkan masih adanya kendala-kendala dalam optimalisasi penatausahaan aset tetap pada masa pandemi covid-19, yakni : (1) Kompetensi Pegawai yang masih rendah dan adanya kebijakan Work From Home (WFH); (2) Peraturan yang berlaku; (3) Kurangnya Motivasi dan Koordinasi Pimpinan; (4) Masih seringnya terjadi kesalahan sistem pada aplikasi Simda; dan (5) Masih kurangnya saran dan prasarana pendukung kegiatan. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Aceh Selatan untuk mengoptimalkan penatausahaan aset tetap pada

masa pandemi covid-19 adalah dengan melakukan (1) Mengadakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM dan pengefektifan program WFH dengan syarat tidak mempengaruhi kinerja pegawai; (2) Menyusun Peraturan Daerah Terbaru terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk Penatausahaan Aset Tetap; (3) Meningkatkan komunikasi antara pimpinan dengan para pegawainya baik melalui motivasi ataupun koordinasi dalam melaksanakan pekerjaan; (4) Berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Pembaruan Aplikasi Simda; (5) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap. **Keterbatasan Penelitian** : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu terbatasnya narasumber dan sulitnya mendapatkan informasi karena termasuk kedalam rahasia negara.

Arah Masa Depan Penelitian : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lainnya sehingga dapat ditemukan informasi baru yang sekiranya akan bermanfaat dikemudian hari.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
Sinurat, Marja. 2015. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah